

KINERJA APP TERKAIT KOMITMEN TANGGUNGJAWAB SOSIAL

MASUKAN MASYARAKAT SIPIL TERKAIT KINERJA APP DALAM ISU-ISU SOSIAL, KEPADA RAINFOREST ALLIANCE YANG MELAKUKAN EVALUASI INDEPENDEN TERHADAP PERKEMBANGAN APP DALAM MEMENUHI KOMITMEN SOCIAL DAN LINGKUNGAN MEREKA

January 2015

LATAR BELAKANG

Asia Pulp dan Paper (APP) mempunyai catatan masalah social dan lingkungan masa lalu yang buruk akibat kinerja mereka dan affiliasinya. Setelah kritik yang tajam dan luas dari perusahaan, kelompok penentang dan tekanan dari pembeli dan investor, pada Februari 2013 APP mengumumkan Forest Conservation Policy (FCP), yang sejalan dengan komitmen public yang telah perusahaan buat untuk 2012-2014, memaksa perusahaan untuk mereformasi praktek bisnisnya dan menyelesaikan kerusakan dan konflik masa yang terjadi dimasa lampau.

APP mempunyai 2,6 juta hektar land bank di Indonesia. Perusahaan sudah menebang dan mengeringkan banyak hutan tropis dan hutan gambut di Sumatera dan Kalimantan, dan mengkonversinya menjadi kebun monokultur untuk kayu bahan kertas. Lebih dari setengah dari kebun tersebut berlokasi di gambut yang kaya karbon. Pengembangan dan operasi dari kebun ini meliputi penebangan hutan alam dan pengeringan gambut, dan ini merupakan sumber utama emisi gas rumah kaca di Indonesia. Masalah masa lalu APP juga meliputi penebangan dan konversi hutan tropis yang kaya biodiversity dan merupakan habitat bagi Harimau Sumatera.

Lebih jauh lagi, pembangunan kebun ini telah menyebabkan biaya besar bagi masyarakat adat dan lokal yang dalam banyak kasus kehilangan lahannya, kehilangan sumber-sumber mata pencaharian dan hak azazi mereka dilanggar. Kegagalan APP dan pemerintah Indonesia untuk menghormati hak – hak masyarakat telah menyebabkan ratusan konflik antara masyarakat dan APP.

Sebagai bagian dari FCP APP, perusahaan berkomitmen untuk menyelesaikan konflik social dan lahan, menghormati hak-hak masyarakat to member atau menunda persetujuan untuk rencana perluasan APP (FPIC), dan untuk transparan. APP komitmen ini disambut baik oleh banyak masyarakat sipil, industry dan pemerintah. Bagaiamanapun, karena APP telah membuat komitmen serupa sebelumnya, dan gagal untuk memenuhinya, banyak kelompok yang mendesak agar evaluasi pelaksanaan komitmen dilakukan secara independen, sebelum para konsumen dan investor kembali dan memulai bisnis dengan APP dan affiliasinya.

Pada Januari 2014, APP mengumumkan bahwa rainforest Alliance akan melakukan evaluasi independen terhadap kinerja perusahaan dalam mengimplementasikan komitmen social dan lingkungan. RA mengembangkan Key Performance Element dan indikator kinerja untuk evaluasi kinerja APP dalam melaksanakan komitmen yang telah mereka buat.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kami adalah sebuah kelompok NGO Indonesia dan Internasional yang fokus pada HAM, isu-isu tanah dan social tetapi dengan komitmen yang mendalam dan memiliki keahlian yang substansial pada isu-isu lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan, secara bersama-sama menyediakan input - umumnya terkait kinerja APP terkait komitmen social dan transparansi, kepada RA. Organisasi tersebut meliputi Wahana Bumi Hijau, Scale Up, Rainforest Action Network, HUMA, Jaringan Masyarakat Gambut Riau, Jaringan Masyarakat Gambut Jambi, Forest Peoples Programme, Link-AR Borneo, Persatuan Petani Jambi, KPA Hijau Kaltim dan Pusaka.

Beberapa group bekerja dengan masyarakat yang terkena dampak APP dan afiliasinya. Beberapa grup telah menjalin hubungan dengan APP baik itu sebelum perusahaan berkomitmen untuk mengadopsi perubahan maupun sesudah komitmen publik perusahaan dibuat, termasuk melalui Focus Group Discussions(FGD), Independent Observers (Pengamat independent) dan pada Solutions Working Group (SWG)

Input kami terhadap evaluasi ini, kami peroleh berdasarkan wawancara dengan pimpinan dan warga desa yang berasal dari sedikit nya 17 kelompok masyarakat yang terkena dampak oleh APP dan afiliasinya di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, yang dilakukan pada Maret dan September 2014. Akhirnya, input dan analisis dari kinerja APP ini, didapat dari hasil observasi dan *engage* dengan APP dalam implemtasi komitmen mereka dalam berbagai skema sejak Februari 2013. Dalam submisi ini, kami mengacu pada data dan hasil analisis dari Key Performance Element dan Indikator yang dikembangkan oleh RA.

Submisi ini terdiri atas beberapa elemen sebagai berikut ;

1. Temuan dan pengalaman terkait kinerja APP dalam implementasi komitmen isu – isu social dan community engagement di 17 Desa
2. Analisis dan kesimpulan terkait kinerja APP dalam Key Element dan indicator dari FCP Policy Commitment APP ketiga terkait isu social dan engagement.
3. Analisis dan kesimpulan terkait kinerja APP dalam Elemen Kunci Tambahan dan indicator terkait transparansi, HCV, HCS dan lain-lain.

Secara spesifik, kami menemukan bahwa ada banyak pekerjaan tersisa yang harus dikerjakan APP sebelum APP dapat dipandang sukses dalam melaksanakan komitmennya terkait penghormatan FPIC, penyelesaian konflik lahan dan isu social lainnya atau untuk dipandang memenuhi kriteria memuaskan dalam pelaksanaan komitmen mereka terkait stakeholder engagement dan transparansi. Meskipun perusahaan sudah meletakkan dasar-dasar untuk mengimplementasikan komitmen

mereka, dalam banyak kasus perubahan signifikan belumlah tercapai (Misalnya, pada tingkat Frest Managemet Unit/ district), dimana masih ditemukan banyaknya praktek yang sama seperti belum adanya FCP.

PENYELESAIAN KONFLIK

Kami mendapati APP tidak tidak menanggapi atau menangani konflik dan keluhan secara baik paling tidak di 4 propinsi. Ini merupakan indikasi yang jelas bahwa APP belum begitu fokus dalam melaksanakan komitmen sosialnya . Ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana perusahaan akan meningkatkan upaya untuk menyelesaikan berbagai konflik yang ada di seluruh konsesinya . Dalam setidaknya lima desa yang mempunyai konflik lahan dan sosial(Manamang Kiri di Kalimantan Timur , Labai Hilir di Kalimantan Barat, Lubuk Mandarsah di Jambi , Muara Bungkal dan Teluk Meranti di Riau), APP telah gagal untuk menginformasikan masyarakat tentang kebijakan, menanggapi keluhan masyarakat secara tepat waktu, memasukkan daftar pengaduan masyarakat sesuai dengan mekanisme pengaduan/ keluhan atau mengikuti elemen kunci lain dalam SOP. Meskipun tidak ada angka yang pasti, namun diyakini masih ada ratusan sengketa yang belum terselesaikan di seluruh wilayah APP dan lahan pemasok-nya .

APP belum berbagi hasil pemetaan konflik atau melakukan konsultasi yang memuaskan dengan pemangku kepentingan utama untuk memperluas pilot percontohan resolusi konflik atau membangun solusi atas pelanggaran hak asasi manusia atau bahaya lain yang masyarakat alami pada masa lalu. Hal ini telah memperlambat para pemangku kepentingan untuk dapat berkoordinasi dengan APP dan masyarakat untuk merencanakan dan berperan konstruktif dalam berbagi informasi dan melakukan pelatihan secara terkoordinasi. Pada beberapa kasus, seperti di Labai Hilir Kalimantan Barat dan Teluk Meranti – Riau, APP bertindak seolah-olah mencegah masyarakat untuk didampingi oleh NGO dalam pertemuan atau negosiasi.

Meskipun kepastian angka tidak dipublish, ada ratusan konflik yang belum selesai terkait APP dan pemasokan. APP menjawab bahwa mereka sudah selesai melakukan pemetaan konflik dan membuat perencanaan penyelesaian konflik. Namun, merupakan sebuah permasalahan ketika masyarakat terdampak dan pemangku kepentingan tidak berkesempatan untuk terlibat dalam proses pemetaan konflik atau dalam perencanaan penyelesaian yang akan terkait dengan masa depan dan kepentingan mereka sendiri.

APP telah membuat kemajuan cukup besar dan memuaskan dalam menyelesaikan konflik di dua komunitas (Datuk Rajo Melayu dan Desa Riding) di mana mereka menjadikan wilayah tersebut sebagai percontohan dan pembelajaran dalam pendekatan resolusi konflik dengan menggunakan mediator pihak ketiga yang independen dan diterima secara luas dalam metodologi resolusi konflik . Dalam kedua kasus ini, masyarakat memilih untuk mempunyai NGO pendamping yang membantu masyarakat dengan mendeiakan informasi yang dibutuhkan dan melakukan penguatan secara berkala. Pendekatan ini menunjukkan hasil yang menjanjikan, dengan satu kasus di Riding – Sumatera Selatan, APP memperoleh kesepakatan pada November 2014, dan ini sebaiknya dipahami sebagai model yang perlu dikembangkan. Selanjutnya, APP sudah membuat kemajuan yang

memuaskan dalam mengembangkan SOP/ protocol resolusi konflik dan FPIC. Sayangnya terkait mekanisme pelayanan keluhan masih menyisakan masalah. Dan dengan ratusan konflik yang perlu diselesaikan, dan dengan kinerja buruk APP dalam menangani keluhan dan menyelesaikan konflik pada 5 desa yang kami survey, APP masih butuh waktu lama untuk dapat dikatakan sukses dalam menyelesaikan konflik yang ada.

FREE PRIOR dan INFORMED CONSENT

Hak masyarakat yang terkena dampak dari PT. OKI Pulp and Paper mill untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan mereka (FPIC) belum dihormati sepenuhnya. APP telah memulai pembangunan pabrik , sayangnya, perusahaan belum mengikuti Standard Operating Procedure (SOP/ Protokol mereka sendiri - yang berkaitan dengan FPIC atau persetujuan tidak dilakukan secara tertulis . APP telah gagal untuk melakukan pemetaan kelompok sosial, kepemilikan dan penggunaan lahan, serta memberikan informasi tertulis yang memadai kepada masyarakat terkait dampak dari penyerahan lahan dan potensi dampak pembangunan proyek . APP juga gagal mengidentifikasi bagaimana pengambilan keputusan dibuat di masyarakat atau menginformasikan masyarakat agar membentuk perwakilan yang dipilih mereka sendiri untuk pertemuan selanjutnya. Selain itu, juga tidak ada perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan . Meskipun APP mengaku sudah mendapatkan persetujuan dari masyarakat, persetujuan tertulis dari mayoritas masyarakat yang terkena dampak langsung pabrik belum didapatkan.

TAMBAHAN ELEMEN KINERJA TERKAIT HCV, HCS, STAKEHOLDER ENGAGEMENT DAN TRANSPARANSI

Dalam submisi ke RA ditemukan bahwa APP gagal untuk secara layak berbagi informasi, berkonsultasi atau menyelesaikan isu social dalam HCV dan HCS. Secara khusus, kinerja APP tidak cukup memuaskan dalam aspek ;

- Proses konsultasi dan mengumpulkan data untuk NKT 5 & 6 dalam draft laporan HCV telah cacat (Misalnya dari lebih dari 1 juta hektar konsesi di Sumatera, kurang dari 3.500 ha yang teridentifikasi sebagai NKT 5 atau 6.
- Isi studi HCV terkait HCV 5 & 6 tidak cukup memadai untuk menangkap sumber mata pencaharian dan nilai-nilai budaya yang terkait dengan daerah yang dinilai.
- Penggunaan dan analisis resiko dalam studi HCV yang kemudian ditindaklanjuti dengan rekomendasi dan perencanaan, telah gagal untuk mempertahankan atau meningkatkan NKT 5 & 6.
- Para pemangku kepentingan belum diberi kesempatan yang layak untuk memberikannya dalam proses HCS, dan Laporan HCS belum dibagi dengan para pemangku kepentingan.

- Ada kekhawatiran yang luar biasa bahwa laporan HCS akan untuk mesnyaratkan pemetaan partisipatif dan mempetimbangkan penggunaan areal penting masyarakat, klaim dan masalah sosial lainnya

Sebagai tambahan dari FPIC, proses penyelesaian konflik dan negosiasi langsung dengan spesifik komunitas, , mekanisme utama APP untuk mengembangkan dan memenuhi komitmennya, serta mencapai kondisi sosial dan lingkungan yang lebih baik adalah melalui Integrated Sustainable Forest Management Plan (ISFMPs, yang akan menggabungkan informasi dan rekomendasi dari berbagai hasil studi seperti HCS, HCV, Pemetaan konflik, dan Analisis Gambut. Hingga September 2014, tidak ada ISFMPs yang telah dikembangkan dan telah ada sedikit pelibatan pemegang hak dan pemangku kepentingan di ISFMPs. Pada bulan Oktober 2014, APP melakukan pertemuan pertama dengan para pemangku kepentingan di Jambi dalam kontek ISFMP, dimana jambi merupakan pilot project-nya. Ini adalah perkembangan yang positif tapi ISFMP Jambi mungkin akan butuh satu tahun atau lebih untuk dikembangkan.

Pengembangan dan implementasi ISFMPs dan penilaian dari proses ini dan dampak dari pelaksanaan itu adalah salah satu indikator yang paling mendasar dan penting untuk apakah APP sebenarnya memenuhi komitmennya. Kurangnya informasi tentang dan kualitas dari pemetaan konflik, studi lahan gambut, HCV dan studi HCS yang menjadi dasar bagi ISFMP menunjukkan bahwa ISFMP akan butuh kehati-hatian untuk dikembangkan, dengan keterlibatan banyak pihak dan kesepakatan dari stakeholder dan dengan menjalankan FPIC dari pemegang hak. Sampai dengan ISFMP telah dikembangkan dan diimplementasikan di Jambi dan beberapa FMU lainnya, itu terlalu dini untuk mengatakan sejauh mana APP memenuhi komitmen sosial dan lingkungan dan apakah perbaikan sosial dan lingkungan yang telah dijanjikan telah dibuktikan.

Submission ini menemukan bahwa sampai saat ini, APP telah gagal untuk memenuhi atau hanya memenuhi sebagian dari komitmen yang berkaitan dengan berbagi informasi, transparansi dan keterlibatan pemangku kepentingan. Dalam beberapa hal, dari pemetaan konflik sosial dan resolusi konflik hingga FPIC, dan dari studi HCV dan HCS hingga pengembangan ISFMP, APP telah gagal untuk berbagi informasi secara memadai atau melibatkan pemegang hak dan pemangku kepentingan utama. Dimana para pemangku kepentingan telah memberikan masukan, ada kadang kalah APP tidak mengadopsi atau juga tidak mampu menjelaskan mengapa hal itu ditolak. Secara umum, ada kesan konsultasi yang terjadi hanya dilakukan pada lingkup kenyamanan perusahaan atau ketika ada tekanan yang kuat. APP masih terus melanjutkan untuk mengesyampingkan bahwa konsultasi public dan masukan para pihak sebagai sebuah kebutuhan dan merupakan bagian penting dalam proses pelaksanaan FCP.

KESIMPULAN

Berdasarkan studi ini, kami memandang bahwa APP masih dalam tahap awal pelaksanaan komitmen sosial dan lingkungannya. Karena ada begitu banyak bidang - misal HCS, ISFMP, FPIC, penyelesaian konflik masyarakat, keterlibatan pemangku kepentingan, pasokan kayu dan transparansi - dimana implementasi belum dimulai atau

hal tersebut masih terlalu dini untuk dilakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan, apakah perusahaan tersebut sudah tersedia atau masih dalam proses pelatihan, atau malahan masih dalam tahapan meletakkan dasar – dasar untuk pelaksanaan pada tahap berikutnya, namun sangat penting bahwa pemantauan dan verifikasi independen dari kinerja APP dilanjutkan .

Organisasi - organisasi yang mengajukan hasil penelitian dan analisis pada Rainforest Alliance mempunyai pandangan bahwa, selain memberikan kontribusi terhadap proses evaluasi, penting bahwa hasil pemantauan, temuan penelitian kami adalah bagian dari informasi publik terkait APP dan kemajuannya dalam menjalankan komitmen sosial dan lingkungan karena tujuan dari adalah untuk memastikan terpenuhinya hak-hak masyarakat dan untuk menemukan solusi bagi setiap pelanggaran. Kami akan terus mengamati dan memeriksa bagaimana APP melaksanakan komitmen sosial dan transparansi, dan akan terus membuat rekomendasi tentang bagaimana APP dapat meningkatkan kinerja terkait komitmen tersebut. Kami akan terus mendukung masyarakat yang terkena dampak APP untuk membantu mereka menyelesaikan konflik, jalan keluar untuk kerugian masa lalu dan untuk mengetahui dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Kami percaya kinerja yang memuaskan dari APP dalam melaksanakan komitmen yang terkait masyarakat dan isu-isu sosial akan membantu membuat perjanjian lebih kuat dan berkeadilan. Kami berkomitmen untuk bekerja sama dan mendukung APP agar mampu melaksanakan komitmennya.

Dengan semangat ini, fokus masukan ini adalah pada daerah di mana kami menemukan bahwa kinerja APP yang kurang atau perlu perbaikan dan di mana APP gagal untuk memenuhi komitmennya. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang status bagaimana perusahaan menerapkan komitmennya, untuk menunjukkan bagian yang perlu perbaikan dan memberikan kritik konstruktif dengan memberikan rekomendasi spesifik untuk perbaikan. Ringkasan eksekutif ini dan penyerahan telah diberikan ke APP sebelum diterbitkan untuk dilakukan koreksi ketidakakuratan faktual dan untuk memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk merespon rekomendasi di bawah ini.

REKOMENDASI

1. APP mengutamakan pelaksanaan komitmen sosial dan praktek terbaik berkaitan dengan FPIC dan resolusi konflik dan akan menambah sumber daya manusia dan kapasitas untuk mencapai hal ini.
2. APP memastikan bahwa pemetaan partisipatif terhadap penggunaan lahan masyarakat, kepemilikan dan klaim dilakukan dan bahwa konflik mengenai penggunaan lahan masyarakat, kepemilikan dan klaim diselesaikan sebelum finalisasi ISFMP.
3. Apabila masyarakat menolak pembangunan pulp dan kertas, ISFMP atau pembangunan lainnya tidak boleh dipaksakan (Dan semua lahan desa sebaiknya dikeluarkan dari, atau 'enclaved' dari konsesi).

4. Apabila masyarakat telah sepakat dengan pembangunan pulp dan kertas dan menyerahkan sebagian tanahnya, maka HCS, HCV dan lahan gambut dan ISFMP harus secara luas dibahas dengan proses partisipatif dan dikembangkan untuk :
 - a. Menjelaskan bagaimana ini akan berarti bagi warga desa dalam hal keberlanjutan akses mereka terhadap lahan dan sumber daya.
 - b. Memperjelas siapa yang akan mengelola wilayah tersebut (misalnya lokasi yang mungkin diusulkan sebagai wilayah kelola masyarakat, co - manajemen atau dikelola perusahaan sesuai dengan peruntukkan kawasan tersebut atau dikelola berdasarkan kesepakatan yang dinegosiasikan dengan masing-masing masyarakat)
 - c. Memastikan berjalan partisipasi penuh masyarakat dalam proses kolektif - FPIC.
5. APP berbagi informasi tentang ekspansi dan rencana akuisisi dengan pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya sehingga pihak terkait dapat memantau dan membantu masyarakat terdampak.
6. APP bekerjasama dengan stakeholder kunci untuk meningkatkan kualitas dari mekanisme keluhan/ SOP, dan juga informasi yang akan dicantumkan dalam dashboard terkait dengan isu social dan ISFMP. Contohnya, APP mengakui that konflik yang saat ini didapat dari hasil pemetaan konflik agar tidak dikeluarkan dari daftar, dan agar transparan terkait spesifik konflik melalui mekanisme keluhan. Rencana aksi penyelesaian konflik harus disetujui oleh pemangku hak, NGO yang mereka pilih dan stakeholder kunci lainnya.
7. APP memberikan kontribusi terhadap Trust Fund dan mekanisme untuk menyediakan layanan nasehat dari ahli (misalnya pemetaan, keuangan, hukum, pertanian, dll) bagi masyarakat dengan sistem yang disepakati oleh Social Issues Working Group.
8. APP bekerjasama dengan pemangku kepentingan dan pemerintah untuk menegakkan aturan atau apabila dibutuhkan melakukan revisi kebijakan dan peraturan terkait, sehingga hak-hak masyarakat dihormati dan terlindungi sebelum pemberian izin kepada HTI, sehingga penyelesaian konflik didalam konsesi dapat terselesaikan.

Rekomendasi untuk menyelesaikan spesifik masalah yang teridentifikasi dalam Submisi ke RA

9. APP , bekerja sama dengan pemegang hak dan pemangku kepentingan , menerbitkan dan menyelesaikan keluhan dari masyarakat yang telah disampaikan (Manamang Kiri di Kalimantan Timur , Labai Hilir di Kalimantan Barat , Lubuk Mandarsah di Jambi , Muara Bungkal dan Teluk Meranti di Riau). APP bekerjasama dengan

pemegang hak dan pemangku kepentingan kunci untuk menyelesaikan complain – complain, dengan langkah awal yang disetujui bersama pengaju keluhan (Komplener), dan NGO pendamping pada tahap yang akan dilakukan untuk menyelesaikan komplek/ keluhan.

10. APP, bersama dengan pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya agar meninjau kembali kekurangan dalam proses FPIC di OKI Mill. Ini harus mencakup pemetaan partisipatif dan studi penguasaan tanah dan bekerja dengan masyarakat untuk mengembangkan proses FPIC disepakati bersama, di mana masyarakat dan berbagai kelompok sosial membentuk dan menunjuk perwakilan mereka sendiri. Selama proses ini dilakukan, konstruksi pabrik dan pendukung lainnya agar ditangguhkan. Dan APP, dapat memulai hal ini dari Desa Bukit Batu dan Jadi Mulya . Proses tersebut juga harus mencakup ;
 - a. Melibatkan partisipasi yang luas dari kelompok-kelompok social didalam masyarakat, paling tidak sampai proses pengambilan keputusan dan perwakilan masyarakat telah disetujui oleh seluruh masyarakat.
 - b. Menjelaskan dan memberikan informasi tertulis, setidaknya terkait : Sifat dari proyek, luasan, kecepatan, lingkup dan tujuan kegiatan; alasan-alasan mengapa kegiatan tersebut dilakukan; durasi kegiatan, area setempat yang akan terkena dampak, analisis awal tentang dampak sosial, lingkungan, ekonomi dan budaya yang mungkin ditimbulkan, serta potensi resiko yang akan terjadi.
 - c. Mendukung masyarakat untuk mendapatkan padangan hukum dari pihak independen, keuangan, lingkungan dan kealhian lainnya yang dianggap perlu.
11. APP menyatakan secara terbuka bahwa gagal untuk sepenuhnya mengikuti protokol mereka sendiri, belum memiliki persetujuan tertulis masyarakat untuk pengembangan pabrik OKI dan akan melakukan pekerjaan lebih lanjut untuk melakukan proses FPIC kredibel dan akan menginformasikan investor dan masyarakat dari hasil.

Rekomendasi terkait Stakeholder Engagement dan Transparansi

12. APP bekerja sama dengan para pemangku kepentingan utama dan penasihat untuk membentuk kelompok kerja resolusi isu-isu sosial (Social Issues Working Group) dengan kerangka acuan yang disepakati bersama oleh para anggotanya, dan juga memungkinkan berbagi informasi dengan konstituen yang relevan.
13. APP bersedia berbagi tentang sistem resolusi konflik, strategi, rencana implementasi serta hasil pemetaan konflik dan studi tipologi konflik serta prosedur terkait lainnya serta data dengan stakeholder kunci .
14. Sosial Isu Working Group dan stakeholder kunci lainnya mengulas dan membuat kesepakatan tentang sistem, strategi dan rencana resolusi konflik termasuk : proses untuk konsultasi dan menyetujui bersama dengan masyarakat dan NGO pendamping

terkait bagaimana spesifik konflik sebaiknya diselesaikan ; tahap berikutnya berikutnya dari program resolusi konflik sosial APP dan membuat target waktu dan milestone pelaksanaannya.

15. APP, kelompok kerja dan stakeholder kunci lainnya mengembangkan dan setuju untuk memantau, melakukan verifikasi dan laporan pendahuluan, dan rencana untuk pelaporan dan monitoring independen dan verifikasi dari pelaksanaan program penyelesaian konflik, strategi, target dan milestone.

DRAFT & RAHASIA